



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;






**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

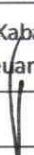
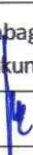



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Paraf Koordinasi	
Kabag Keuangan	
Kabag Hukum	
Assisten III	
SEKDA	
Wakil Bupati	
Bupati	untuk di TTD

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727).

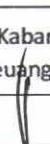
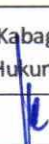
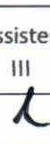
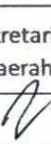

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.






Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 686.047.950.924,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4






- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp72.254.178.809,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.338.873.922,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.923.116,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.007.381.771,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp18.338.873.922,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Rp157.031.798,00;
  - b. Pajak Sarang Burung Walet Rp14.400.000,00;
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.050.000.000,00;
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 1.341.116.496,00;
  - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 83.460.056,00.
  - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp 5.821.736.134,00;
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 4.920.681.988,00;
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 4.950.447.450,00
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.907.923.116,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum Rp 860.103.116,00;
  - b. Retribusi jasa usaha Rp 647.820.000,00;
  - c. Retribusi perizinan tertentu Rp400.000.000,00
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

(4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 47.007.381.771,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 3.500.000.000,00
- b. Jasa giro Rp1.000.000.000,00
- c. Pendapatan bunga Rp500.000.000,00
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp 19.000.000.000,00
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp4.500.000.000,00
- f. Pendapatan dari Pengembalian Rp500.000.000,00
- g. Pendapatan BLUD Rp18.000.000.000,00






Pasal 6

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp600.250.141.384,00 (Enam Ratus Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.712.963.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.537.178.384,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

**Pasal 7**

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp586.712.963.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)., yang terdiri atas :
- a. Dana Desa Rp 80.443.229.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 2.871.709.000,00
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 376.795.552.000,00
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 126.602.473.000,00

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.547.178.384,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :






- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp5.267.178.384,00
- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp15.000.000,00
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp 8.255.000.000,00

**Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.617.890.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yaitu :
- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan
  - (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.017.890.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 9**






Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp667.191.750.924,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp514.260.772.639,75 (Lima Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tujuh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.602.880.175,83 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Delapan Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.574.824.638,92 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Sembilan Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.046.600.000,00 (Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.778.967.825,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

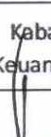
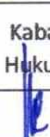

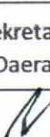
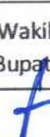
Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.257.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

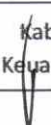


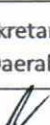

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.602.880.175,83 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Delapan Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (1) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp246.035.699.253,15 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Koma Satu Lima Rupiah).
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.099.814.992,68 (Seratus Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Koma Enam Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.885.223.134,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.342.796,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 412.800.000,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).






Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

Pasal 12

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp246.035.699.253,15. (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Koma Satu Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Gaji Pokok ASN Rp184.218.930.978,61
  - b. Tunjangan Keluarga ASN Rp16.511.193.650,00
  - c. Tunjangan Jabatan ASN Rp4.487.621.600,00
  - d. Tunjangan Fungsional ASN Rp9.324.271.600,00
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.094.464.200,00
  - f. Tunjangan Beras ASN Rp10.198.274.198,00
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp259.083.034,00
  - h. Pembulatan Gaji ASN Rp2.990.275,80
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp14.190.617.653,38
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp441.225.585,80
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.307.026.477,56
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.099.814.992,68 (Seratus Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Koma Enam Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp 3.207.377.091,00
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp 27.365.800.901,68
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp 70.526.637.000,00
- (3) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.885.223.134,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp 561.540.000,00
  - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp 63.621.600,00

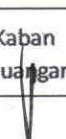
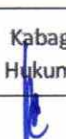
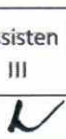
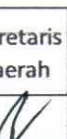

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- c. Tunjangan beras DPRD Rp 83.138.160,00
  - d. Uang paket DPRD Rp 56.154.000,00
  - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp 814.233.000,00
  - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp 86.752.050,00
  - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp 13.702.500,00
  - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp1.890.000.000,00
  - i. Tunjangan reses DPRD Rp472.500.000,00
  - j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp0,00
  - k. Pembulatan gaji DPRD Rp100.000,00
  - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp 3.255.884.784,00
  - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp3.300.000.000,00
  - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp 287.597.040,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.342.796,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp 54.600.000,00
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp 4.116.000,00
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp 98.280.000,00
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp 5.069.400,00
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp 471.156,00
  - f. Pembulatan Gaji KDh/WKDH Rp 2.520,00
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp 6.279.840,00
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp 131.040,00
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp 392.840,00
- (5) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 412.800.000,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 112.800.000,00
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00

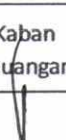


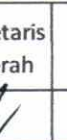

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

**Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 142.574.824.638,92 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Sembilan Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.579.317.941,05 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Koma Nol Lima Rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp. 32.673.308.254,51
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 53.703.963.984,70 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Koma Tujuh Nol Rupiah ), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp 31.030.229.204,70
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 13.038.030.400,00
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp 45.000.000,00
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 3.087.875.000,00
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp 653.906.480,00
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp 155.000.000,00
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp 35.000.000,00
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp 72.800.000,00
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 5.489.122.900,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp 82.000.000,00
  - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp 15.000.000,00
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.744.991.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp 110.000.000,00
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 976.714.600,00
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 607.277.000,00
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp31.000.000,00
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp20.000.000,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.578.393.232,17 (Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Koma Satu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6.529.636.032,16
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp 56.100.000,00
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 4.992.657.200,01
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.728.774.268,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp 57.500.000,00
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp 3.671.274.268,00
- (7) belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.083.582.894,00 (Empat Belas Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 10.788.799.260,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

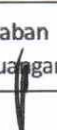
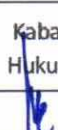
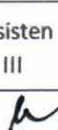
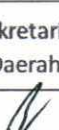
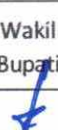
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.367.001.459,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.046.600.000,00 (Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp 300.000.000,00 dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang Rp 5.746.600.000,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.778.967.825,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapana Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp 2.325.000.000,00
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp 751.867.825,00
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.325.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.325.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp 900.000.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				






- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp475.000.000,00
  - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan Rp590.000.000,00
  - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp360.000.000,00
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 751.867.825,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 17






- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.257.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 29.837.045.814,25 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Belas Koma Dua Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal Gedung dan bangunan;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal asset tetap lainnya
  - f. belanja modal asset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 795.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.807.918.973,25 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Lima Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp 383.907.600,00
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp 150.000.000,00
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian Rp 158.738.499,00
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 437.598.074,00
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 87.918.500,00
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 23.092.416,00
  - g. Belanja Modal Komputer Rp 456.008.887,25
  - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp 7.700.000,00
  - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp 300.000.000,00
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp 3.074.917.606,00
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp 1.728.037.391,00
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.142.627.850,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp 7.927.683.700,00
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 309.983.000,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp 904.961.150,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.003.899.491,00, (Sepuluh Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Empat Ratus Sembilan Satu Rupiah). yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp 5.017.287.491,00
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp 445.000.000,00
  - c. Belanja Modal Instalasi Rp 4.541.612.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				




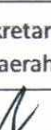

- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.874.599.500,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Semilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) yang terdiri dari:
- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Rp 1.780.439.500,00
  - (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Rp 73.320.000,00
  - (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Rp 20.840.000,00
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.213.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah ) yang terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp 538.000.000,00
  - 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp675.000.000,00

#### Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp122.093.932.470,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil
  - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.058.435.704,00 (Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa Rp 1.833.887.392,00
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp 224.548.312,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.035.496.766,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp 592.267.766,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 119.443.229.000,00

Pasal 21


Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.740.731,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.740.731,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.- (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

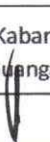

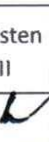
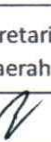

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp18.856.200.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.356.200.000,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

Pasal 24






- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) Rp16.930.459.269,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp16.930.459.269,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

### Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANOCU





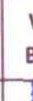
Diundangkan di Kwardang  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR  
607, TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Assisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
				

**KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>72.254.178.809,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	18.338.873.922,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	157.031.798,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	157.031.798,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	157.031.798,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	14.400.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	14.400.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	14.400.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.050.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.050.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.050.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.341.116.496,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.341.116.496,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.341.116.496,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	83.460.056,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	83.460.056,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	83.460.056,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.821.736.134,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	845.550.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	845.550.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	4.770.686.134,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	4.770.686.134,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	155.250.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	155.250.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	47.250.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	47.250.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.920.681.988,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	4.920.681.988,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	4.920.681.988,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.950.447.450,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	4.950.447.450,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	4.950.447.450,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.907.923.116,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	860.103.116,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	193.303.116,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	159.716.556,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	33.586.560,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	358.000.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	260.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	83.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	15.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	647.820.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	55.600.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	55.600.000,00
4.1.02.02.013	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	116.000.000,00
4.1.02.02.013.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	116.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	16.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	16.000.000,00
4.1.02.02.015	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	1.260.000,00
4.1.02.02.015.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	1.260.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	75.240.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	75.240.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	383.720.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	383.720.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.007.381.771,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.500.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.500.000.000,00
4.1.04.01.002.00055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	681.668.417,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	681.668.417,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	318.331.583,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	318.331.583,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	19.000.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.900.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.900.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.500.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.500.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00
4.1.04.15.015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	500.000.000,00
4.1.04.15.015.00036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	18.000.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000.000,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	7.381.771,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.381.771,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	7.381.771,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>600.250.141.384,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.712.963.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	80.443.229.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	80.443.229.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	80.443.229.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.871.709.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	1.746.464.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	723.797.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	1.022.667.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	725.245.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	6.188.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	259.042.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	460.015.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	400.000.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	400.000.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.795.552.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	363.941.903.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	363.941.903.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	12.853.649.000,00
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.369.578.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.484.071.000,00
4.2.01.08.002.00006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	126.602.473.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	9.723.738.000,00
4.2.01.09.001.00037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.296.436.000,00
4.2.01.09.001.00040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.076.238.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.351.064.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	116.878.735.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.018.900.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	279.500.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	120.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.285.367.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	130.000.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	600.000.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.241.296.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.200.870.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	490.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.591.400.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.052.900.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.569.595.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.788.972.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	68.121.270.000,00
4.2.01.09.002.00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	216.165.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.537.178.384,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	13.537.178.384,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.537.178.384,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.267.178.384,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.255.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.617.890.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	600.000.000,00
4.3.01.04.001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	600.000.000,00
4.3.01.04.001.00001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	600.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.017.890.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.548.000,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.548.000,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.548.000,00
4.3.03.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	3.402.342.000,00
4.3.03.05.001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	3.402.342.000,00
4.3.03.05.001.00001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	3.402.342.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>684.122.210.193,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>513.005.322.639,75</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	358.499.018.872,83
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	245.931.837.950,15
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	184.115.069.675,61
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	114.492.131.871,61
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	69.622.937.804,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.511.193.650,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.568.917.464,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.942.276.186,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.487.621.600,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.487.621.600,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.311.531.600,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.308.941.600,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.590.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.107.204.200,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	995.206.800,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.111.997.400,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.198.274.198,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.008.678.704,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.189.595.494,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	259.083.034,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	258.114.262,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	968.772,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.990.275,80
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.553.516,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.436.759,80
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.190.617.653,38
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.991.750.161,50
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.198.867.491,88
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	441.225.585,80
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	273.792.615,76
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	167.432.970,04
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.307.026.477,56
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	805.068.679,60
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	501.957.797,96
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	101.099.814.992,68
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.207.377.091,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.207.377.091,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	27.365.800.901,68
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	27.365.800.901,68
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.526.637.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	68.121.270.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.285.367.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	120.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.885.223.134,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.621.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.621.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.138.160,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.138.160,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.752.050,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.752.050,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	100.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	100.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.255.884.784,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	57.575.784,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.160.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.149.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.168.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.597.040,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.597.040,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.342.796,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	471.156,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	471.156,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.520,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.520,00
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.279.840,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.279.840,00
5.1.01.05.008	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.009	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	392.840,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	392.840,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	412.800.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.423.235.941,92
5.1.02.01	Belanja Barang	31.516.644.644,05
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	31.481.204.321,05
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	141.339.867,50
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	97.773.025,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.308.883.139,63
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	143.209.331,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.942.557,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	221.555.855,36
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.430.293.242,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.754.150,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.500.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	791.281.775,65
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	542.656.182,95
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.106.465.032,27
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	62.108.752,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	162.337.077,90
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.615.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	282.082.209,97
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.193.487.708,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	107.197.514,92
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.256.366.327,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.930.703.000,00
5.1.02.01.001.00041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	71.999.670,30
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.289.217.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.915.674.250,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.040.004.870,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	21.600.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	95.073.477,60
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	401.194.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.000.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	184.234.300,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.500.000,00
5.1.02.01.001.00067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.445.625,00
5.1.02.01.001.00069	Belanja Pakaian Teknik	4.456.380,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	29.700.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	45.800.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	259.503.000,00
5.1.02.01.001.00078	Belanja Pakaian Jas/Safari	12.250.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	35.440.323,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.133.895,00
5.1.02.01.004.00121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	29.280.000,00
5.1.02.01.004.00124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.064.568,00
5.1.02.01.004.00204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	250.920,00
5.1.02.01.004.00237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	710.940,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	53.828.998.584,70
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	31.047.263.804,70
5.1.02.02.001.00002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	40.000.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	490.024.500,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	392.474.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	81.400.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	525.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.899.337.316,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	855.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	221.400.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	16.465.200,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.953.320,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	40.200.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	227.625.173,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.772.600.080,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	563.407.825,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	243.181.013,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	608.674.608,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.000.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.274.662,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	744.821.800,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	428.395.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	358.280.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	189.417.108,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	2.803.832.300,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.419.937.576,70
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	38.010.000,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	60.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	307.386.323,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	1.392.000.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	103.635.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.120.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	468.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	320.400.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	32.400.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	3.600.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	1.429.200.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	79.200.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	1.450.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00091	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang diangkat pada BLUD selain PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3.241.296.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.038.030.400,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.780.000.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.000.032.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	111.110.400,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	138.888.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	600.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	408.000.000,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00
5.1.02.02.003.00001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.195.875.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.029.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	166.875.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	653.906.480,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	491.155.000,00
5.1.02.02.005.00030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.005.00049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	42.520.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	103.731.480,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	155.000.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.000.000,00
5.1.02.02.008.00028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	75.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00
5.1.02.02.009.00009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	35.000.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	72.800.000,00
5.1.02.02.011.00001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	72.800.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.489.122.900,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.086.635.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	1.783.236.400,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	1.470.526.500,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	148.725.000,00
5.1.02.02.014	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	82.000.000,00
5.1.02.02.014.00005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	82.000.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.015.00005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	15.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.744.991.600,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	110.000.000,00
5.1.02.03.001.00017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	110.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	976.714.600,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	50.000.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	52.500.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	511.384.600,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.400.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.220.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	25.690.000,00
5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	138.120.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	92.900.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.500.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	607.277.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.277.000,00
5.1.02.03.003.00006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	300.000.000,00
5.1.02.03.003.00045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	120.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.000.000,00
5.1.02.03.004.00079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.364.443.232,17
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.364.443.232,17
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.327.636.032,16
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	56.100.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.980.707.200,01
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.728.774.268,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.500.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.500.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	45.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.671.274.268,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.671.274.268,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	14.083.582.894,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	12.933.042.894,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	12.163.542.894,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	769.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	872.980.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	660.480.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	212.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	277.560.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	187.560.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.788.799.260,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.788.799.260,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.788.799.260,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.367.001.459,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.367.001.459,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.367.001.459,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.046.600.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	300.000.000,00
5.1.03.03.003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	300.000.000,00
5.1.03.03.003.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	300.000.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.746.600.000,00
5.1.03.04.003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	4.746.600.000,00
5.1.03.04.003.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	4.746.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.778.967.825,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.325.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	900.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	900.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	475.000.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	475.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	590.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	590.000.000,00
5.1.05.05.005	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	360.000.000,00
5.1.05.05.005.00001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	360.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	751.867.825,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	751.867.825,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	751.867.825,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.702.100.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.857.600.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.857.600.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	844.500.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	844.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.257.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.257.500.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.217.500.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.217.500.000,00
5.1.06.02.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.02.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.092.495.814,25</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	795.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	795.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	795.000.000,00
5.2.01.01.001.00002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	500.000.000,00
5.2.01.01.001.00004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	70.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	225.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.913.368.973,25
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	383.907.600,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	383.907.600,00
5.2.02.01.001.00001	Belanja Modal Tractor	383.907.600,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	150.000.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	150.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	158.738.499,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	158.738.499,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20.738.499,00
5.2.02.04.001.00009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	138.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	543.048.074,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	335.953.641,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.886.750,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	327.066.891,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	207.094.433,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	32.025.815,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.415.105,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	19.054.363,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	79.999.150,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.600.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	87.918.500,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	82.318.500,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.318.500,00
5.2.02.06.001.00004	Belanja Modal Peralatan Cetak	75.000.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.600.000,00
5.2.02.06.002.00010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	5.600.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.092.416,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.757.818,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	17.757.818,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.334.598,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.334.598,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	456.008.887,25
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	354.554.664,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	354.554.664,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	101.454.223,25
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	62.631.323,25
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	38.822.900,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.700.000,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	7.700.000,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	7.700.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00
5.2.02.19.001.00001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	250.000.000,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	50.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.074.917.606,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.074.917.606,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.074.917.606,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.728.037.391,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.728.037.391,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.728.037.391,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.192.627.850,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.977.683.700,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.677.683.700,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.495.483.700,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.426.000.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	621.200.000,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	695.000.000,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	40.000.000,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00
5.2.03.01.002.00013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	309.983.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	309.983.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	309.983.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.961.150,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.961.150,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	904.961.150,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.003.899.491,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.017.287.491,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	4.260.187.491,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	3.720.187.491,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	540.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	757.100.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	292.100.000,00
5.2.04.01.002.00005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	465.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	445.000.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	275.000.000,00
5.2.04.02.001.00007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	275.000.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	170.000.000,00
5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	170.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.541.612.000,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.541.612.000,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.541.612.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.874.599.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.874.599.500,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.780.439.500,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.780.439.500,00
5.2.05.89.002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	73.320.000,00
5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	73.320.000,00
5.2.05.89.003	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.840.000,00
5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.840.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.313.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.313.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.313.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	638.000.000,00
5.2.06.01.001.00006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	675.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>123.093.932.470,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.058.435.704,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.833.887.392,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.833.887.392,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.833.887.392,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	224.548.312,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	224.548.312,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	224.548.312,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	121.035.496.766,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	592.267.766,00
5.4.02.01.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	592.267.766,00
5.4.02.01.002.00001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	592.267.766,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	120.443.229.000,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.443.229.000,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	119.443.229.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000,00
5.4.02.05.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>667.191.750.924,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>16.930.459.269,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.925.740.731,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.925.740.731,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.925.740.731,00
6.1.01.05.001	<i>Penghematan Belanja-Belanja Operasi</i>	1.925.740.731,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.740.731,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.856.200.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	18.356.200.000,00
6.2.03.04.003	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
6.2.03.04.003.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18.856.200.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-16.930.459.269,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 31 Desember 2025

Bupati  
  
**THARIQ MODANGGU**